

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pertemuan Ke-2 *Stakeholder* Dalam Rangka Implementasi *Harvest Strategy* Perikanan Tuna Di WPP-NRI 713, 714 dan 715

Bogor, 30-31 Oktober 2019

A. KESIMPULAN

1. Perairan Kepulauan (WPP-NRI 713, 714 dan 715), adalah bagian dari wilayah Perairan Indonesia yang diapit oleh 2 (dua) Samudera Besar yaitu: Samudera Hindia dan Pasifik yang kaya akan sumber daya tuna. Dalam 14 tahun terakhir (2005-2018) estimasi rata-rata hasil tangkapan tuna (Cakalang, Madidihang, Tuna Matabesar dan Albakora) dari wilayah perairan kepulauan ini mencapai 298,586 ton atau sekitar 53% dari estimasi total hasil tangkapan tuna nasional Cakalang, Madidihang, Tuna Matabesar dan Albakora) yang rata-rata sebesar 567.867 ton per tahunnya. Oleh karenanya, dalam rangka menjamin keberlangsungan sumber daya dan usaha perikanan tuna di Perairan Kepulauan tersebut, Pertemuan *Stakeholder* ke-2 memandang penting agar Pemerintah dan seluruh stakeholders terkait lainnya untuk terus konsisten mengimplementasikan *Interim Harvest Strategy Framework* yang telah di-*launching* pada saat pertemuan *Bali Tuna Conference* ke-3, tanggal 31 Mei 2018. Implementasi *Harvest Strategy* ini merupakan salah satu elemen dasar yang penting dan diperlukan dalam menjamin pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan dan konsep *Harvest Strategy* ini sudah diadopsi oleh *tuna Regional Fisheries Management Organization* termasuk oleh *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*.
2. Penyusunan dokumen *Harvest Strategy* (HS) untuk perikanan tuna di WPPNRI 713, 714 dan 715, yang telah dilakukan sejak tahun 2014, telah dimutakhirkan pada pertemuan teknis ke-5 (*the 5th technical workshop*) yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 28-29 Oktober 2019. Selanjutnya dipaparkan hasil-hasilnya pada Pertemuan *Stakeholder* ke-2. Hal-hal yang dimutakhirkan berdasarkan input data seri tahun 2016-2018, meliputi:
 - 1.1. Penambahan jumlah set data yang digunakan dari 3 menjadi 7 set data (WPEA (Puriskan-WCPFC), FADs (ACIAR-Puriskan), Log Book (SDI-DJPT), BRPL, i-fish data (MDPI, AP2HI dan LINI/SFP),
 - 1.2. Estimasi indeks kelimpahan relatif SKJ dengan pendekatan CPUE standarisation
 - 1.3. Analisis selektivitas untuk melihat kemampuan alat tangkap dalam menyeleksi ukuran panjang ikan pada alat tangkap *longline*, *pole and line*, *handline* dan *purse seine* di WPP-NRI 713, 714 dan 715.

3. Berdasarkan hasil the *5th technical workshop* yang hasil-hasilnya telah dipresentasikan pada Pertemuan *Stekholder ke-2* disimpulkan bahwa kandidat *Harvest Control Rules (HCR)* belum dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menetapkan *Trial Target Reference Point. Prototype Operating Model* yang telah dibangun pada tahun 2018 masih memerlukan pemutakhiran. Disamping itu tercatat bahwa input data seri tahun 2016-2018 pada *Prototype Operating Model* belum dapat dipergunakan.
4. Data input tahun 2016-2018 belum lengkap, belum mewakili keseluruhan data yang dapat menggambarkan dinamika per kwartal. Indeks kelimpahan relatif untuk *Yellowfin Tuna* belum dapat diestimasi karena masih terbatasnya data longline yang belum bisa menggambarkan variasi kuartal atau musiman, dan analisa selektivitas untuk *Yellowfin Tuna* dari salah satu set data *Pole and Line* belum dapat diestimasi karena tidak terpenuhinya *fitting model*. Setelah ada perbaikan data, *prototype Operating Model* dapat diperbaharui.
5. Walaupun masih diperlukan perbaikan data untuk implementasi *Harvest Strategy* lebih lanjut, *Pertemuan Stakeholder ke-2* mencatat sejumlah perbaikan untuk analisa data kelimpahan cakalang (*CPUE Standardization, Deviance Explained* mencapai sekitar 76%). Terkait dengan *Yellowfin Tuna*, berdasarkan hasil analisis distribusi panjang dan selektivitas alat tangkap *long line*, terdapat kemungkinan perbaikan status stok *Yellowfin Tuna* dimana ada kecenderungan peningkatan ukuran hasil tangkapan *Yellowfin Tuna*, dengan ukuran panjang tangkapan yang lebih besar dari *length at first maturity* (100 cm) bergeser dari 133,7 cm (2010-2012) menjadi 149 cm (2017-2018). Tetapi terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa kondisi stok telah membaik, hal ini mengingat jumlah sampel yang dianalisa masih sangat sedikit (10% dari jumlah sampel hasil kajian yang sama di tahun 2010-2012). Pertemuan menyepakati agar data *longline* yang diperlukan dalam analisa lebih lanjut dapat diperbaiki dan dipenuhi dari para stakeholder yang berasosiasi dengan perikanan long line di WPP-NRI 713, 714 dan 715.
6. Berdasarkan hasil kajian selektivitas alat tangkap dan distrubusi ukuran panjang hasil tangkapan cakalang (SKJ) dari masing-masing alat tangkap *pole and line*, *purse seine* dan *hand line* cenderung lebih dominan tertangkap diatas *length at first maturity* (40 cm). Berbeda dengan *Yellowfin Tuna*, hasil tangkapan dari *pole and line*, *hand line* (dioperasikan di permukaan dan yang menggunakan ukuran mata pancing kecil) dan *purse seine* memberikan kontribusi yang besar tertangkapnya ukuran dibawah *length at first maturity* (100 cm). Pertemuan menyepakati perlunya pembatasan jumlah, musim dan ukuran ikan yang tertangkap lebih lanjut dari hasil tangkapan *purse seine* serta pengendalian wilayah operasi *purse seine*, setelah melalui kajian yang kromprehensif.

7. Berdasarkan hasil pengkajian stok tuna tahun 2017 di kawasan regional yang dilakukan oleh WCPFC untuk *Yellowfin Tuna*, Indonesia masuk kedalam *Stock Assessment Region 7* (meliputi pemanfaatan oleh negara Filipina, Vietnam, Papua Nugini dan Indonesia). Hasil kajian terakhir dilakukan pada tahun 2017 di seluruh wilayah WCPFC (*9 Region*) menggambarkan laju tingkat pemanfaatan yang cenderung menurun, dimana rata-rata ratio *Spawning Biomass* saat ini terhadap *Unfished Spawning Biomass* berada di posisi 0,33. Kecenderungan penurunan dalam 10 tahun terakhir juga terjadi di *Region 7* dengan ratio *Spawning Biomass* saat ini terhadap *Unfished Spawning Biomass* lebih rendah diposisi 0,27.
8. Sementara itu hasil Kajian Stok yang dilakukan oleh WCPFC terhadap *Skipjack Tuna* di tahun 2019, merekomendasikan adanya penambahan region pada pembagian *Stock Assessment Region* dari yang sebelumnya 5 region menjadi 8 region. Indonesia yang semula berada di region 4 kini berada di region 5. Hasil pengkajian tersebut menunjukkan ratio *Spawning Biomass* saat ini terhadap *Unfished Spawning Biomass* di WCPO sebesar 0,44 pada tiga tahun terakhir, hal ini dimungkinkan sebagai hasil dari perbaikan pendataan yang telah dilakukan. Namun demikian di region 5, ratio *Spawning Biomass* saat ini terhadap *Unfished Spawning Biomass* saat ini berada di posisi 0,25 atau ada di posisi sedikit di atas *limit reference point* (0,20).
9. Walaupun kandidat *harvest control rules* dan *trial target reference point* belum bisa disepakati lebih lanjut, Pertemuan *Stakeholder* ke-2 menyepakati 5 (lima) opsi tindakan pengelolaan yang telah disepakati pada Pertemuan Penyusunan *Harvest Strategy* ke-6 tahun 2017 untuk dapat dilaksanakan dalam rangka implementasi *Harvest Strategy*, perlu didahului dengan evaluasi yang komprehensif sebelum melakukan 5-Opsi Pengelolaan sebagai berikut: yaitu (1) pengendalian penggunaan rumpon, (2) penutupan daerah penangkapan tertentu (3) pengendalian jumlah hari operasi penangkapan (4) pengendalian jumlah kapal, dan (5) pengendalian tingkat hasil tangkapan.
10. Pertemuan juga memandang upaya-upaya yang strategis dalam implementasi *Harvest Strategy*, perlu memperhatikan aspek perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan kecil (<10 GT), mengingat kontribusi yang signifikan dari perikanan rakyat ini.

B. REKOMENDASI

1. Merekomendasikan semua pihak untuk meningkatkan disiplin pengumpulan data yang merupakan input utama bagi implementasi HS, meliputi:
 - a. Memastikan data yang dikumpulkan oleh seluruh Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki keseragaman yang sama serta meliputi kebutuhan data minimum yang sesuai dan dapat terintegrasi dengan e-BRPL;

- b. Penyampaian data dengan basis form e-BRPL (port sampling), observer dan logbook penangkapan ikan, pada selambatnya 4 maret setiap tahun melalui email sdi.djpt@yahoo.com dan harvesttuna@gmail.com. Pertemuan data (*data preparation workshop*) per kwartal disarankan dilakukan secara konsisten;
 - c. Penyusunan standar form data sosial ekonomi dan pengumpulan data sosial ekonomi;
 - d. Menyelesaikan penginputan data kapal daerah dalam SIMKADA dan pendaftaran kapal yang menangkap tuna di Perairan Indonesia (DIVA-TUNA) untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan perikanan tuna, cakalang dan tongkol.
- 2. Merekomendasikan agar 5 (lima) opsi tindakan pengelolaan dapat terus dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik perikanan dan kebutuhan stakeholder di setiap daerah, dengan rekomendasi lebih lanjut adalah sebagai berikut:
 - 1.1 Opsi Ke-1, yaitu Pengendalian Penggunaan Rumpon, merekomendasikan agar Pemerintah segera meninjau kembali ketentuan penempatan dan penggunaan dan rumpon bagi usaha penangkapan ikan, dengan pokok-pokok pengaturan, antara lain:
 - a. Kewenangan perizinan dan pengawasan Pemerintah dan Pemerintah daerah,
 - b. Peta potensial pemasangan rumpon,
 - c. Spesifikasi dan ketentuan pemasangan rumpon, dan
 - d. Kepemilikan dan Pemanfaatan, termasuk mengatur pemanfaatan rumpon oleh nelayan andon.
 - 1.2 Opsi Ke-2, yaitu Penutupan Daerah Penangkapan, merekomendasikan kepada Pemerintah agar mengkaji kembali larangan penangkapan ikan di WPP-714 agar dapat memberikan hasil yang efektif guna melindungi sumber daya tuna yang berpijah (*breeding* dan *spawing*), dengan pokok-pokok pengaturan antara lain:
 - a. Segera menindaklanjuti hasil Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Kepmen No. 04/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 yang telah dilakukan Pada tanggal 12 September 2019, dimana telah disepakati 3 rekomendasi a.l. pengecualian “Nelayan Kecil” di Provinsi Maluku dari ketentuan pelarangan sebagaimana ditetapkan oleh Permen tersebut
 - b. Pemikiran perluasan wilayah penutupan dapat dilakukan setelah ada kajian yang komprehensif dan disesuaikan dengan ketentuan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan masalah bagi perikanan skala kecil, khususnya nelayan kecil.

- 1.3 Opsi Ke-3, yaitu Pengendalian jumlah hari operasi memerlukan kajian lebih lanjut secara komprehensif sebelum ditetapkan.
- 1.4 Opsi ke-4, yaitu Pengendalian Jumlah Kapal, merekomendasikan untuk mengusulkan kepada Pemerintah:
 - a. Terkait pembatasan jumlah kapal izin pusat yang beroperasi di WPP-NRI 713, 714 dan 715 agar terus dilanjutkan dan kapal berukuran > 100 GT yang masih beroperasi di perairan kepulauan didorong ke ZEE Indonesia. Merekomendasikan lebih lanjut supaya kesepakatan ini diformalkan dalam sebuah ketentuan atau aturan yang diterbitkan oleh Pemerintah.
 - b. Agar menerbitkan aturan untuk pengendalian jumlah ijin penangkapan kapal daerah yang menangkap tuna di WPP-NRI 713, 714 & 715, namun demikian hal ini harus dilakukan setelah kajian yang komprehensif. Hal ini dimaksud agar kondisi sumber daya cakalang dan madidihang (*Yellowfin Tuna*) yang tahun 2017 berada sedikit di atas *Limit Reference Point* dapat terus menunjukan indikasi perbaikan status stok.
 - c. Perlu dilakukan perbaikan pendataan untuk kapal nelayan kecil.
- 1.5 Opsi ke-5, yaitu pengendalian tingkat hasil tangkapan, merekomendasikan kepada Pemerintah:
 - a. Terus melakukan kajian untuk dapat menentukan Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan, termasuk *baseline effort* dan *baseline catch*;
 - b. Perlu dilakukan kajian pembatasan hasil tangkapan, khususnya di daerah yang hasil tangkapannya memiliki kualitas hasil tangkapan yang rendah, agar nilai dan kualitas ikan hasil tangkapan tersebut lebih dapat ditingkatkan dan lebih banyak lagi yang bisa diekspor.
 - c. Perlu segera dibuatkan “Strategi Nasional Penguatan Kualitas Hasil Tangkapan Nelayan Kecil” agar nilai yang diperoleh dapat lebih ditingkatkan.
3. Merekomendasikan agar dilakukan kajian sosial-ekonomi yang lebih komprehensif supaya hasilnya dapat dipergunakan, antara lain dalam penentuan seleksi kriteria *Harvest Control Rules* serta merekomendasikan lebih lanjut agar dapat dilakukan kajian preferensi pasar (*Markert Study*).
4. Merekomendasikan agar pengembangan kelembagaan tuna harus dilakukan, baik dengan membangun kelembagaan tuna yang mandiri atau dengan memperkuat penguatan kelembagaan Komnas Pengkajian Sumber Daya Ikan, dengan menambahkan unsur bidang sumber daya ikan beruaya jauh, sumber daya ikan WPPNRI dan sumber daya ikan perairan umum daratan. Mengusulkan perubahan PERMEN-KP Nomor 30/PERMEN-KP/2016 tentang

Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, yang meliputi perubahan definisi, fungsi serta struktur dalam rangka penguatan kelembagaan pengelolaan tuna termasuk di wilayah regional dimana Indonesia menjadi anggota RFMO. Pengembangan kelembagaan dimaksud diharapkan mengakomodir “Komite Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna”, sebagai *platform* konsultasi pengelolaan perikanan tuna, yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

5. Merekomendasikan untuk melanjutkan kesepakatan dan rekomendasi Pertemuan Ke-1 Stakeholder tahun 2018 yang masih mungkin dapat dilaksanakan, a.l. sosialisasi hasil-hasil pertemuan stakeholder ke daerah-daerah di WPP-NRI 713, 714 dan 715 dan konsultasi publik terhadap aturan baru yang akan direvisi (perlu mendapat masukan daerah).

Bogor, 31 Oktober 2019

Ttd.

Peserta Pertemuan Stakeholder Ke-2